

Pembangunan Identitas Nasional dalam Konteks Masyarakat Multikultural melalui Situs Kewarganegaraan Berbasis Agama

Annisa Istiqomah

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: annisa.istiqomah1992@gmail.com

Abstrak

Identitas nasional adalah istilah yang merujuk pada jati diri atau kepribadian suatu bangsa yang dibangun dari manifestasi nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Identitas nasional memberikan ciri bagi suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara multikultural faktor penting yang membentuk identitas nasional adalah etnisitas, kesukuan, ras, agama, bahasa dan perbedaan-perbedaan lainnya yang masing-masing memiliki kekhasan. Keberagaman tersebut di bingkai menjadi satu kesatuan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Merujuk dari berbagai faktor penting yang membentuk identitas nasional, penulis tertarik untuk mengkaji peran situs kewarganegaraan berbasis agama (tempat ibadah) dalam membangun identitas nasional. Agama memiliki peranan yang kuat dalam membangun identitas nasional bangsa karena agama mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung terbentuknya pembangunan identitas nasional melalui simbol, ritual, norma dan jaringan yang sifatnya universal. Perbedaan agama di Indonesia memberikan eksklusivitas bagi masing-masing agama untuk memainkan peranannya melalui situs kewarganegaraan guna mengatasi etnosentrisme dan memungkinkan komunikasi lintas budaya guna mendukung pembangunan identitas nasional bangsa. Keterkaitan antara agama dan identitas nasional memberikan kewajiban bagi situs kewarganegaraan khususnya tempat ibadah untuk berperan aktif dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural seperti toleransi, saling menghargai dan menghormati, inklusif, sebagai konsekuensi atas adanya perbedaan agama di Indonesia yang mampu mendukung pembangunan identitas nasional.

Kata kunci: *agama, identitas nasional, multikultural, situs kewarganegaraan.*

Pendahuluan

Identitas nasional adalah jati diri yang dimanifestasikan dari beragam nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting yang membentuk identitas nasional bangsa Indonesia misalnya etnisitas, kesukuan, ras, agama, dan berbagai bentuk perbedaan lainnya yang menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia. Identitas nasional dibangun dari identitas lokal yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia baik berupa etnis, suku, ras, atau agama yang terangkai dalam satu kesatuan dengan wadah Bhineka Tunggal Ika. Artinya bahwa realitas keberagaman yang terdapat di Indonesia bukan dimaknai sebagai sebuah permasalahan karena pada akhirnya seluruh identitas lokal tersebut meleburkan diri menjadi satu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa berdasarkan pada persamaan nasib, penderitaan, dan sejarah di antara individu yang kemudian membentuk suatu entitas yang disebut sebagai bangsa guna mewujudkan tujuan secara bersama-sama. Namun demikian, berbagai persoalan muncul di permukaan akibat perbedaan yang secara vertikal mewarnai kehidupan bangsa seperti kekuasaan, ekonomi, dan pendidikan. Masyarakat Indonesia yang pada awalnya

terpadu menjadi kesatuan, terpecah belah karena perebutan kekuasaan atau sumber daya ekonomi yang mengatasmakan primordialisme atau sentimen kedaerahan yang selanjutnya berdampak pada menguatnya identitas lokal atau etnik yang berlebihan sehingga melemahkan identitas nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk membangun kembali identitas nasional bangsa Indonesia yang salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan peran situs kewarganegaraan berbasis agama (tempat ibadah).

Agama adalah salah satu reproduksi kebudayaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong terbentuknya identitas nasional selain dari etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Berbeda dengan etnis, nilai agama sifatnya lebih universal artinya agama tidak terbatas eksistensinya pada suatu wilayah sebagai bentuk sentimen kedaerahan atau primordialisme. Beck (Schnabel & Hjerem, 2014:1) berpendapat bahwa nilai-nilai agama memiliki kekuatan melampaui batas-batas yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti etnis, jenis kelamin, atau usia, sehingga agama dapat memainkan peran yang lebih fleksibel dalam membangun identitas nasional. Prinsip suatu ajaran agama untuk tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya sebagaimana tertuang dalam sila Pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" dan pentingnya penanaman nilai-nilai dalam

konteks masyarakat multikultural seperti toleransi, demokrasi, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain dapat diinternalisasikan melalui melalui situs kewarganegaraan berbasis agama.

Hal ini karena situs-situs kewarganegaraan dapat digunakan sebagai sarana dalam menginternalisasi nilai-nilai multikultural yang berperan penting dalam mengatasi etnosentrisme, memperoleh kemampuan untuk berempati dengan budaya lain, mengembangkan sarana kerjasama yang melintasi batas-batas budaya dalam lingkungan multikultural, memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi melintasi batas-batas budaya, misalnya melalui bilingualisme, dan membentuk identitas kolektif baru, yang terdiri dari individu yang memiliki perbedaan budaya. Situs kewarganegaraan berbasis agama seperti tempat ibadah menjadi sarana bagi para pengikutnya untuk memahami perbedaan sebagai jati diri yang memberikan pengaruh terhadap menguatnya identitas nasional suatu bangsa.

Konsep Teori Identitas Nasional

Pemahaman tentang identitas nasional berkaitan erat dengan istilah bangsa sebagai simbol atau institusi masyarakat yang terbentuk berdasarkan latarbelakang yang sama di antara individu. Maolalaidh & Stevenson (2014:246) menyatakan bahwa bangsa menyediakan dan membentuk lingkungan, media, mata uang dan bahasa yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Para pemimpin nasional menkonstruksi suatu visi bangsa dalam retorika publik dengan menarik berbagai aspek seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan psikologis. Konstruksi visi bangsa tersebut akan mempengaruhi ketahanan nasional apabila dilihat dari sejauh mana konstruksi visi bangsa tersebut disepakati dan diterima oleh rakyat. Sarinah, dkk (2017: 47) mengemukakan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman sejarah dan penderitaan. Identitas nasional menurut Sarinah juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa, filsafat Pancasila dan kepribadian bangsa. Rahman & Madiung (2017: 85) menyatakan bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang membedakan dengan bangsa lain

Castell (2011) dalam bukunya *The Power of Identity* mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi historis berbagai unsur yang saling melekat erat seperti sosial, agama, ekonomi, budaya, geografis. Bechhofer & McCrone (2010) mengembangkan gagasan lebih lanjut bahwa identitas nasional melibatkan klaim, diterimanya klaim, dan atribusi karakteristik identitas kepada orang lain berdasarkan apa yang dapat dirasakan. Pendapat yang dikemukakan oleh Bechhofer & McCrone

menunjukkan bahwa aktor memiliki kapasitas yang cukup besar untuk membangun dan menegosiasikan identitas nasional dengan selalu memperhatikan konteks dimana mereka berada. Oleh karena itu konsep identitas nasional dapat dilihat sebagai engsel antara struktur dan tindakan. Bechhofer & McCrone melihat identitas nasional berbeda dalam beberapa hal dari bentuk identitas sosial lainnya karena secara konvensional dilihat berhubungan dengan kewarganegaraan, bukan sesuatu yang lebih intim dan personal seperti gender, ras atau kelas sosial. Identitas nasional tidak bebas dipilih secara independen dari batasan struktural, yang terpenting adalah kebutuhan untuk mempertahankan, menantang dan mengubahnya dalam proses interaksi.

Negara-negara demokratis dapat menggunakan identitas nasional untuk memperkuat kebanggaan dan kohesi nasional namun mereka harus berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan kelompok yang berbeda. Kymlicka (2007: 83) mengemukakan bahwa identitas nasional adalah kekuatan mengikat yang membentuk hubungan erat antara individu dan negara. Namun demikian, identitas nasional tidak sama dengan semua kelompok sosial karena beberapa kelompok dapat memprioritaskan identitas budaya dan etnis mereka sendiri daripada identitas nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Shulman (2002:202) menunjukkan bahwa identitas nasional dan kelompok minoritas adalah hubungan yang dekat tetapi sering memunculkan sebuah permasalahan. Colhoun (Schnabel & Hjern, 2014:2) mengemukakan bahwa identitas nasional adalah suatu komunitas politik otonom yang mampu menentukan nasib sendiri. Komunitas tersebut terdiri dari individu yang merasa memiliki kesamaan nasib yang serupa dengan individu lainnya.

Miller (Hung, 2014: 203) mengemukakan bahwa ketika sebuah negara terbentuk maka bahan etnik tersebut menjadi bercampur dengan identitas nasionalnya. Oleh karena itu, keragu-raguan identitas nasional terus muncul karena sering kali mendukung kelompok budaya mayoritas atau kelompok yang secara tradisional mendominasi politik. Lecours (2000: 158) mengemukakan bahwa membangun identitas nasional yang dapat diterima bersama adalah proses '*nationbuilding*', yang bermanfaat bagi koherensi internal dan penyertaan seluruh masyarakat. Pendirian identitas nasional semacam itu dapat menjadi simbol yang berarti dan kuat bagi warga negara. Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtues*) dan tanggung jawab warga negara bukanlah sebuah rangsangan romantis namun sebenarnya dapat dilakukan sebagai ungkapan alami tentang pentingnya identitas nasional dalam kehidupan manusia

Identitas nasional merupakan dasar kepercayaan yang dianggap serupa sedangkan kohesi sosial masih mempertimbangkan persepsi, kepercayaan, sikap, dan tindakan individu (Hjern & Schnabel, 2010:530).

Menurut Jones & Smith (2001:105) identitas nasional berkontribusi untuk menjadi bagian dari kelompok yang berkaitan dengan wilayah tertentu dengan batas yang jelas namun dapat dinegosiasikan. Terdapat dua dimensi identitas nasional yang mapan yaitu dimensi etnis yang dicirikan oleh ciri-ciri yang asal atau objektif seperti negara kelahiran atau keturunan biasa dan dimensi kewarganegaraan atau voluntaristik yang mencakup sebuah komunitas yang mengacu pada undang-undang dan institusi, kemauan politik bersama, persamaan hak bagi anggota negara, dan nilai-nilai umum, tradisi, atau sentimen yang minimum.

Jenkins (Schnabel & Hjerm 2014: 3) mengemukakan bahwa identitas nasional adalah bagian dari pembentukan identitas individu yang menyediakan sarana bagi individu untuk memahami siapa mereka dalam hubungan dengan orang lain. Identitas nasional berkontribusi untuk menjadi bagian dari kelompok yang berkaitan dengan wilayah tertentu dengan batas yang jelas namun dapat dinegosiasikan. Identitas nasional mencakup dimensi emosional dari kesetiaan, afiliasi, dan komitmen yang jauh lebih besar dan spesifik daripada kepercayaan umum karena berakar pada asumsi kesamaan. Dengan karakteristik identifikasi seperti itu dan kepemilikan bersama, kontinuitas, dan stabilitas, identitas nasional dalam bentuk gabungannya dapat mewakili aspek khusus dari kohesi sosial.

Sejalan dengan teori tersebut maka identitas nasional Indonesia mencakup kedua dimensi tersebut yaitu dimensi etnis dan dimensi kewarganegaraan atau voluntaristik. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa dalam membangun identitas nasional, Indonesia mengakomodasi berbagai kepentingan identitas lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh *the founding fathers* dalam merumuskan dasar dan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu dimensi kewarganegaraan juga merupakan salah satu aspek dalam membangun identitas nasional bangsa Indonesia, hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari persamaan nasib yang mencakup dimensi emosional dan kesetiaan untuk meraih kemerdekaan bangsa.

Identitas Nasional dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Identitas nasional dalam konteks masyarakat multikultural dibangun dengan cara berbeda apabila dibandingkan dengan negara monokultural. Menurut Jacobsen (Feeny, et.al, 2012:139) bahwa salah satu tugas utama elit pembangun bangsa adalah mewujudkan identitas nasional dengan mengkoordinasikan daerah-daerah pedalaman nasional yang heterogen secara kultural untuk mencegah munculnya nasionalisme pesaing lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya

dalam membangun identitas nasional harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam wilayah suatu bangsa seperti kultur yang heterogen untuk mengantisipasi adanya konflik persaingan yang berbasis pada identitas. Putnam (2007: 150) mengemukakan bahwa multikulturalisme mengikis fondasi kewarganegaraan karena terlalu banyak keragaman yang akan menghambat kepercayaan sosial, solidaritas, kesetiaan, dan kebijakan yang mene-kankan keragaman. Pernyataan Putnam tersebut adalah bentuk kekhawatiran terhadap paham multikulturalisme yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berakibat pada mengikisnya kewarganegaraan. Hal ini karena dengan adanya berbagai bentuk keberagaman sehingga menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mengidentifikasi dimensi status kewarganegaraan mereka.

Barry (Rietveld, 2014: 51) menyatakan bahwa kebijakan multikultural yang mengenali perbedaan budaya sangat kondusif terhadap loyalitas kelompok dibandingkan loyalitas pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme, yang dipahami sebagai respons politik terhadap keragaman budaya di masyarakat memungkinkan etnis minoritas mempertahankan budaya mereka dan menerima akomodasi oleh negara. Uberoi & Modood (2013:24) menyatakan bahwa hubungan antara multikulturalisme dan identitas nasional saling melengkapi. Multikulturalisme sebagai bentuk integrasi yang menerima keragaman dilihat sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa yang didasarkan pada identitas minoritas budaya serta identitas nasional. Hal ini sebagaimana yang terjadi di negara Inggris bahwa perkembangan kebijakan Inggris menekankan nilai-nilai dan identitas nasional bersama sehingga tidak akan bertentangan dengan multikulturalisme melainkan memberikannya penyeimbangan kewarganegaraan yang menekankan kewarganegaraan bersama di samping akomodasi identitas budaya minoritas. Dengan penerimaan semacam ini maka multikulturalisme tidak mengancam identitas nasional namun dapat membantu membuatnya lebih inklusif. Sejalan dengan konsep tersebut, Indonesia adalah salah satu negara yang membentuk identitas nasional dengan merangkul keberagaman yang ada dalam masyarakat, multikulturalisme diartikan secara positif yaitu paham yang menyatukan perbedaan tanpa mengikis perbedaan yang menjadi kekhasan dalam setiap kelompok tersebut.

Rex (1996) mengemukakan bahwa kebijakan multikultural memberikan beberapa bentuk alternatif dalam kehidupan masyarakat yang secara budaya beragam di berbagai negara. Di Swedia, kebijakan multikultural menuntut untuk perlakuan yang adil terhadap masyarakat minoritas terutama berkaitan dengan hak sosial yang harus diperoleh. Di Belanda terdapat kebijakan yang dikenal dengan istilah *pilarisasi* yaitu kebijakan yang ditunjukkan untuk mengakomodasi perbedaan antara agama Kristen dan

Katolik sekuler yang masing-masing memiliki insititusi pendidikan, media, organisasi serikat dagang secara tersediri, dll. Di Inggris, negara yang ditandai dengan diskriminasi warna yang parah, secara resmi menuangkan paham multikulturalisme dalam kebijakan sebagai langkah untuk memerangi diskriminasi rasial dan warna, pengakuan dan toleransi terhadap keragaman budaya. Pada prinsipnya, semua negara multikultural ini akan mengklaim bahwa mereka berusaha untuk menumbuhkan keragaman budaya sekaligus mempromosikan kesetaraan setidaknya di bidang sosial. Namun, sangat sering, retorika sebuah multikulturalisme egaliter menyembunyikan adanya multikulturalisme yang didasarkan pada ketidaksetaraan.

Multikulturalisme tidak mengancam identitas nasional namun dapat membantu membuatnya lebih inklusif. Anderson (2010: 58) menyatakan multikulturalisme dipahami sebagai respons politik terhadap keragaman budaya di masyarakat yang memungkinkan etnis minoritas mempertahankan budaya mereka dan menerima akomodasi oleh negara. Sikap positif terhadap identitas nasional berisiko menahan pluralisme sekaligus memberikan perhatian pada hegemoni budaya, dan etno-nasionalisme sebagai penghambat strategi multikulturalisme (Callan, 2010:80). Menurut Ljunggren (2014: 2-44) keragaman bentuk-bentuk kehidupan budaya yang memunculkan masyarakat multietnis merupakan faktor penting yang menjadi latar belakang terbentuknya identitas suatu bangsa. Pada prinsipnya, semua negara multikultural ini akan mengklaim bahwa mereka berusaha untuk menumbuhkan keragaman budaya sekaligus mempromosikan kesetaraan setidaknya di bidang sosial.. Indonesia adalah salah satu negara yang membentuk identitas nasional dengan merangkul keberagaman yang ada dalam masyarakat, multikulturalisme diartikan secara positif yaitu paham yang menyatukan perbedaan tanpa mengikis perbedaan yang menjadi kekhasan dalam setiap kelompok tersebut.

Hubungan Antara Agama dan Identitas Nasional

Salah satu faktor penting yang mendukung pembangunan identitas nasional suatu bangsa adalah agama. Agama memiliki kedudukan yang lebih fleksibel dibanding dengan faktor penting lain seperti etnis, suku, atau ras karena nilai-nilainya yang bersifat universal. Penelitian yang dilakukan Schnabel & Hjerm (2014:1) menunjukkan bahwa religiusitas individu memainkan peran penting dalam mempertahankan kedua bentuk identitas nasional yaitu etnik dan kewarganegaraan, hal ini didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, semakin menguatnya hubungan antara negara dan agama, maka akan semakin menguat pula identitas etnik. *Kedua*, semakin homogenitas religius maka semakin kuat identitas etnik; *Ketiga*, tidak ada hubungan antara tingkat agregat organisasi keaga-

maan dan identitas. Agama tampaknya menjadi perhatian individu dalam mendukung efek homogenisasi dan integrasi masyarakat sipil. Meskipun demikian, agama juga terbukti memiliki kekuatan eksklusif terhadap mereka yang bukan anggota kongregasi, gereja, atau komunitas yang berkuasa.

Penelitian yang dilakukan Schnabel & Hjerm menyimpulkan bahwa agama terus memainkan peran utama dalam pembuatan masyarakat sipil, namun keadaan spesifiknya bervariasi sesuai dengan representasi religius. Dengan kata lain, agama bisa membentuk dan melepaskan identitas nasional. Ahli sosiologi agama seperti Fukuyama (2001:19) mengemukakan bahwa agama di satu sisi dapat mendukung kohesi sosial melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan bersama. Selain itu menurut Beck (Schnabel & Hjerm, 2014:1) bahwa agama memiliki kekuatan untuk melampaui batas-batas yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti asal etnis, jenis kelamin, atau usia.

Penelitian baru menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara para individu yang mengikuti praktik keagamaan atau kepercayaan dalam membentuk integrasi nasional. Sementara di sisi lain menurut Gross & Ziebertz (2010: 184) agama cenderung eksklusif bagi mereka yang bukan merupakan bagian dari kongregasi secara dominan. Menurut Durkheim (Schnabel & Hjerm (2014: 1) agama memberikan norma, makna, ritus dan simbol yang diperlukan serta struktur yang memberikan kesempatan dalam memfasilitasi keterikatan interpersonal yang dianggap mampu membentuk solidaritas dan kohesi sosial. Fukuyama (2001:19) menyatakan bahwa agama merupakan salah satu sumber modal sosial yang efektif dalam mempromosikan masyarakat sipil. Perubahan budaya yang terinspirasi secara religius tetap menjadi pilihan langsung di banyak bagian dunia karena agama secara historis menjadi salah satu sumber budaya terpenting. Menurut Greeley (Schnabel & Hjerm, 2014:2) bahwa modal sosial yang dihasilkan oleh struktur keagamaan tidak hanya mendukung relawan religius formal tapi juga sekuler.

Organisasi keagamaan menyediakan sistem norma tertentu dan peluang struktur, namun serikat pekerja, klub olahraga, atau inisiatif gerakan sosial dapat berfungsi setara fungsional dalam menyediakan struktur kesempatan untuk keterlibatan warga negara dan produksi modal sosial (Putnam dalam Schnabel & Hjerm 2014:2). Agama juga mengembangkan pengaruhnya melalui kepercayaan komunal dan sistem makna, moral, dan nilai bersama yang memiliki kekuatan untuk melibatkan kesetiaan anggota melalui interpretasi, norma dan sanksi. Dengan cara ini, agama membentuk pemahaman tentang kewarganegaraan dalam suatu masyarakat dan perilaku sosial yang dapat diterima. Agama sebagai sistem ideologis (dan juga ketidakhadirannya) dimanifestasi-

kan di dalam struktur pemerintahan sebagai konstitusi dan kebijakan kesejahteraan (Manow dalam Schnabel & Hjerm, 2014:2).

Welch, et.al (2004: 318) menyatakan bahwa kepercayaan yang didorong oleh agama tidak harus mencakup semua warga negara karena agama tidak hanya berfokus dalam meningkatkan hubungan di antara anggota yang tergabung dalam kelompok keagamaan tetapi juga menjembatani antara kelompok masyarakat. Putnam & Campbell (2010:628) menyatakan bahwa organisasi keagamaan menyediakan sistem norma tertentu dan peluang struktur yang berfungsi dalam menyediakan struktur kesempatan untuk keterlibatan warga negara dan produksi modal sosial. Dengan demikian, agama mengembangkan pengaruhnya dalam membentuk pemahaman tentang kewarganegaraan pada masyarakat dan perilaku sosial yang dapat diterima melalui kepercayaan komunal, sistem makna, moral, dan nilai bersama yang memiliki kekuatan untuk melibatkan kesetiaan anggota melalui interpretasi, norma dan sanksi.

Agama memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan perasaan individual terhadap identitas nasional berdasarkan teori efek integratif agama yang dikemukakan oleh Durkheim yang menyatakan bahwa religiusitas individu dapat mendukung identitas nasional. Sedangkan menurut teori modal sosial harapannya terdapat pengaruh positif dari para anggota suatu keagamaan atau kepercayaan. Sebuah studi internasional mengenai identitas nasional yang dilakukan oleh Schnabel & Hjerm menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara yang kuat dapat mendukung identitas nasional. Peran yang dimainkan hubungan agama dan negara dalam membentuk identitas (kolektif) tampaknya bergantung pada benteng organisasi agama dan pada diskontinuitas rezim politik. Hubungan erat antara negara dan agama merupakan perasaan yang lebih intens dari identitas etnik nasional.

Pembangunan Identitas Nasional dalam Konteks Masyarakat Multikultural melalui Situs Kewarganegaraan Berbasis Agama

Identitas nasional bangsa Indonesia dipahami sebagai manifestasi dari berbagai bentuk identitas lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan negara lain, Indonesia dalam membangun identitas nasional harus tetap memperhatikan berbagai identitas lokal yang ada, hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang multikultural adalah salah satu bentuk kekuatan bagi Indonesia dalam membangun identitas nasional apabila dikelola dengan baik. Dengan demikian, diperlukan penanaman nilai-nilai yang yang dianggap mampu mewujudkan masyarakat Indonesia dalam bingkai mul-

tikulturalisme, yaitu pemahaman arif bijaksana terhadap berbagai budaya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun dan damai sebagai langkah dalam mewujudkan identitas nasional bangsa.

Guna mewujudkan masyarakat multikultural yang dapat hidup berdampingan, toleran, dan saling menghargai terdapat prinsip-prinsip dasar demokrasi yang patut dikembangkan di Indonesia yaitu kesetaraan derajat individu, toleransi terhadap perbedaan, konflik dan konsensus, hukum yang adil dan beradab dan perikemanusiaan (Mahfud, 2013: 103). Yaqin (2007: 26) menyatakan bahwa nilai-nilai multikultural yang ditransmisikan melalui pendidikan multikultural adalah nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi. Ahli lain, Bennet (Tilaar, 2003: 171) mengemukakan empat nilai inti multikulturalisme yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai multikultural adalah inklusif, cinta tanah air, toleransi, saling menghargai (apresiasi terhadap pluralitas), humanis, bertanggung jawab, dan demokratis.

Situs-situs kewarganegaraan adalah suatu lokasi yang memungkinkan ditumbuhkembangkannya nilai-nilai demokrasi dalam diri masyarakat. Melalui situs-situs kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif dalam memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Birzea (2000:28) mengemukakan bahwa gagasan tentang 'situs' bukanlah gagasan tentang 'lokasi'. Situs adalah suatu tempat yang terbentuk dari praktik-pratik demokrasi serta memungkinkan adanya proses penanaman nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Situs terdiri dari inisiatif (organisasi pekerja, tempat ibadah, sekolah, pusat, institusi, masyarakat, lingkungan, kota, wilayah dll) yang berusaha memberi definisi dan menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan demokratis modern. Internalisasi nilai-nilai multikultural dapat dilakukan melalui situs-situs kewarganegaraan karena menurut Birzea (2000:27-28) situs-situs kewarganegaraan mampu mengatasi etnosentrisme, memperoleh kemampuan untuk berempati dengan budaya lain, mengembangkan sarana kerjasama yang melintasi batas-batas budaya dalam lingkungan multikultural, memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi melintasi batas-batas budaya, misalnya melalui bilingualisme, dan membentuk identitas kolektif baru, yang terdiri dari individu yang memiliki perbedaan budaya.

Persoalan identitas nasional bangsa yang disepakati sebagai suatu kondisi dinamis memberikan catatan bagi para elit bangsa untuk terus memberikan perhatian dalam menguatkan identitas nasional. Kaelan (2013:40) menyatakan bahwa identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis mengingat bangsa Indonesia terdiri dari sekumpulan individu-individu yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain baik secara sosial maupun budaya. Disadari atau tidak bahwa saat ini identitas nasional semakin menunjukkan dilematika, hal ini karena berbagai faktor yang mendukung terciptanya identitas nasional semakin memudar, misalnya etnisitas. Etnisitas adalah salah satu identitas lokal yang mewakili sekelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Fearon & Laitin (2003: 76) yang mengemukakan bahwa etnis adalah kelompok sosial yang kelayakan keanggotaannya ditentukan oleh atribut berbasis keturunan.

Identitas lokal tersebut pada dasarnya merupakan pondasi dalam membangun identitas nasional. Namun demikian, beberapa kurun terakhir terjadi fenomena menguatnya ikatan primordialisme atau sentimen kedaerahan yang diakibatkan karena perebutan sumber-sumber kekuasaan atau ekonomi dari adanya unsur diskriminasi pemerintah. Menguatnya identitas lokal ini dapat menjadi ancaman bagi pembangunan identitas nasional, sehingga diperlukan faktor penting lainnya yang mampu menguatkan kembali identitas nasional bangsa Indonesia, salah satunya yaitu agama. Agama dapat membentuk dan melepaskan identitas nasional. Agama mampu mendukung kohesi sosial melalui simbol, ritual, norma, jaringan bersama, makna, ritus, yang memberikan kesempatan dalam memfasilitasi keterikatan dalam membentuk solidaritas dan kohesi sosial. Agama dinilai dapat mendukung homogenisasi dan proses pengintegrasian masyarakat sipil yang dapat dilakukan melalui kepercayaan komunal, sistem makna, moral, dan nilai bersama yang memiliki kekuatan untuk melibatkan kesetiaan anggota melalui interpretasi, norma dan sanksi. Jadi, dengan cara ini, agama membentuk pemahaman tentang kewarganegaraan dalam suatu masyarakat dan perilaku sosial yang dapat diterima. Agama memainkan peran utama dalam pembentukan masyarakat sipil yaitu dengan menciptakan dan mempertahankan perasaan individual terhadap identitas nasional berdasarkan teori integratif. Peran agama tersebut dapat diinternalisasi melalui situs-situs kewarganegaraan (rumah ibadah atau tempat ibadah) yang utamanya menanamkan pemahaman bahwa perbedaan agama bukan merupakan suatu problematika tetapi suatu kekhasan bangsa yang apabila dimaknai secara arif dan bijaksana akan menciptakan kerukunan umat beragama.

Situs kewarganegaraan berbasis agama seperti rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga berfungsi untuk tempat bermusyawarah dan menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di

dalam masyarakat. Menurut Ayub, dkk (1996:7-8) fungsi masjid tidak sebatas untuk kegiatan beribadah tetapi juga sebagai tempat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini juga berlaku di agama Kristen atau Konfusianisme yang dikemukakan oleh Fukuyama (2001: 7-8) bahwa norma-norma yang membentuk modal sosial secara terperinci diartikulasikan melalui organisasi keagamaan seperti Kekristenan atau Konfusianisme sebagai nasihat tentang pentingnya menjaga toleransi diantara warga masyarakat yang memiliki perbedaan agama. Masyarakat yang memahami perbedaan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai toleransi dianggap dapat membentuk kohesi sosial di antara sesama umat beragama. Rumah ibadah seperti masjid atau gereja sebagai salah satu situs kewarganegaraan diharapkan mampu menjadi sarana dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural seperti inklusif, cinta tanah air, toleransi, saling menghargai (apresiasi terhadap pluralitas), humanis, bertanggung jawab, dan demokratis. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam membangun identitas nasional yaitu dengan menguatkan peran penting agama sebagai salah satu unsur yang mendukung terciptanya identitas nasional. Situs kewarganegaraan berbasis agama seperti masjid, gereja, klenteng, dan pura dianggap dapat dijadikan sebagai sarana dalam memupuk nilai-nilai dalam masyarakat multikultural sehingga perbedaan dipahami sebagai sebuah kekuatan untuk membangun identitas nasional.

Penutup

Berdasarkan kajian-kajian mengenai proses pembangunan identitas dalam konteks masyarakat multikultural melalui situs kewarganegaraan berbasis agama dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Identitas nasional mencakup dimensi emosional dari kesetiaan, afiliasi, dan komitmen yang jauh lebih besar dan spesifik daripada kepercayaan umum karena berakar pada asumsi kesamaan.
2. Multikulturalisme sebagai bentuk integrasi yang menerima keragaman merupakan bagian dari proses pembangunan bangsa yang didasarkan pada identitas minoritas budaya serta identitas nasional.
3. Agama mampu membentuk dan melepaskan identitas nasional melalui pembentukan solidaritas dan kohesi sosial. Agama mempunyai hubungan suportif antara negara dan agama yang dapat berfungsi sebagai komponen integral dari pemahaman diri etnistas bangsa.
4. Situs-situs kewarganegaraan mampu mengatasi etnosentrisme, memperoleh kemampuan untuk

berempati dengan budaya lain, mengembangkan sarana kerjasama yang melintasi batas-batas budaya dalam lingkungan multikultural, memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi melintasi batas-batas budaya, misalnya melalui bilingualisme, dan membentuk identitas kolektif baru, yang terdiri dari individu yang memiliki perbedaan budaya.

5. Agama memainkan peran utama dalam pembentukan masyarakat sipil yaitu dengan menciptakan dan mempertahankan perasaan individual terhadap identitas nasional berdasarkan teori integratif. Situs kewarganegaraan berbasis agama seperti masjid, gereja, klenteng, dan pura dapat dijadikan sebagai sarana dalam memupuk nilai-nilai dalam masyarakat multikultural sehingga perbedaan dipahami sebagai sebuah kekuatan untuk membangun identitas nasional.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2010). *The nation and the origins of national consciousness*. In: Guibernau M, Rex J (eds) *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism & Migration* (56-63). Polity, Cambridge.
- Ayub, M.E., Muhsin, M.K., Mardjoned, R. (1996). *Manajemen masjid: petunjuk praktis bagi para pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Birzea, C. (2000). *Eduaction for democartic citizenship: a lifelong learning perspectives*. Strasbourg: Council of Europa.
- Bechhofer, F., & McCrone, D. (2010). Choosing national identity. *Sociological Research Online*, 15 (3) 3, 1-13. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5153/sro.2191>
- Callan, E. (2010). The better angels of our nature: patriotism and dirty hands. *Journal of Political Philosophy*, 18(3), 249-270. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9760.2009.00352.x/abstract>
- Castell, M. (2011). *The power of identity: the information age: economy, society, and culture*. New Jersey: John Wiley & Sons
- Fearon, J.D., & Laitin, D.D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. *The American Political Science Review*. 97(1):75-90. <https://web.stanford.edu/group/ethnic/..apsa011.pdf>
- Feeny, S., Leach, M., Scambray, J. (2012). Measuring Attitudes to National Identity and Nation-building in Papua New Guinea. *Political Science*, 64(2), 121-144. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032318712466762>.
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7-20. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713701144>
- Gross, Z., & Ziebertz, H.-G. (2010). *Religion and xenophobia*. In H.-G. Ziebertz, W. K. Kay, & U. Riegel (Eds.), *Youth in Europe III* (181-199). Berlin, Germany: LIT-Verlag.
- Hjerm, M., & Schnabel, A. (2010). Mobilizing nationalist sentiments: Which factors affect nationalist sentiments in Europe?. *Social Science Research*, 39, 527-539. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X10000657>
- Hung, Cheng-Yu . (2014). Teachers' Perceptions of National Identity in the English and Taiwanese Citizenship Curricula: civic or ethnic nationalism?. *Research in Comparative and International Education*, 9(1): 197- 212. <http://dx.doi.org/10.2304/rcie.2014.9.2.197>
- Jones, F. L., & Smith, P. (2001). Individual and societal bases of national identity. A comparative multi-level analysis. *European Sociological Review*, 17, 103-118. <https://doi.org/10.1093/esr/17.2.103>
- Kaelan. (2013). Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. *Prosiding FGD Pakar, PSP UGM*. Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dan Masyarakat Pengawal Pancasila Joglo Semar (Jogja Solo Semarang), Yogyakarta, 14 September 2013, 36-69.
- Kymlicka, W. (2007). *Multicultural odysseys*. New York: Oxford University Press
- Lecours, A. (2000). Ethnic and civic nationalism: towards a new dimension. *Space and Polity*, 4(2), 153-166. <http://dx.doi.org/10.1080/13562570020013672>
- Ljunggren, C. (2014). Citizenship Education and national identity: teaching ambivalence. *Policy Futures in Education*. 12 (1). 36-47 <http://dx.doi.org/10.2304/pfie.2014.12.1.34>
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maolalaidh, M.N., & Stevenson, C. (2014). National identity in a foreign context: Irish women accounting for their children's national identity in England. *Discourse & Society*, 25(2), 245-262. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0957926513516049>
- Putnam, R.D. (2007). *E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century The*

- 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies*, 30(2): 137-174. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.515.6374&rep=rep1&type=pdf>
- Putnam, R.D., & Campbell, D.E. (2010). *American grace: how religion divides and unites us*. New York, NY: Simon & Schuster
- Rahman, A., & Madiung, Baso. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Rex, John. (1996). National identity in the democratic multi-cultural state. *Sociological Research Online*. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5153/sro.18>
- Rietveld, Elise. (2014). Debating multiculturalism and national identity in Britain: Competing frames. *Ethnicities*, 14(1), 50–71. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468796813497209>
- Sarinah., D, Muhtar., & Harmaini. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di perguruan tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish
- Schnabel, A., & Hjerm, M. (2014). How the Religious Cleavages of Civil Society Shape National Identity, *Sage Open*, 1-14. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244014525417>
- Shulman, S. (2002). Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of Nationalism. *Comparative Political Studies*, 35(5), 554-587. <http://dx.doi.org/10.1177/0010414002035005003>
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dan Perspektif Studi Kultural*. Malang: IndonesiaTera.
- Uberoi, V., & Modood, T (2013). Inclusive britishness: a multiculturalist advance. *Political Studies*, 61(1): 23–41. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2012.00979.x/abstract>
- Welch, M. R., Sikkink, D., Sartain, E., & Bond, C. (2004). Trust in God and trust in man: the ambivalent role of religion in shaping dimensions of social trust. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 43, 317-343. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2004.00238.x/abstract>
- Yaqin, Ainul. 2007. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.